

BAB 5

SARAN

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 Februari 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi khusus milik Dinas Kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk mempermudah pemberian informasi kesehatan.
2. Walaupun pelaksanaan PKP Dinas Kesehatan dilakukan via *daring*, alangkah baiknya jika Dinas Kesehatan juga memberikan tambahan video terkait tempat-tempat yang ada di Dinkes sehingga calon apoteker mempunyai gambaran lebih mengenai pekerjaan kefarmasian pemerintahan disana.

DAFTAR PUSTAKA

- DinKes Prov Jatim, 2021, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, https://dinkes.jatimprov.go.id/index.php?r=site/berita_detail&id=4. Diakses pada februari 2021
- Dinkes Prov. Jatim, 2010, *PONED sebagai Strategi untuk Persalinan yang Aman*. (Online). www.depkes.go.id. Diakses 20 Februari 2021.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Asman Toga dan Akupresur*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit*, Jakarta.

- Kementerian Kesehatan RI, 2019, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2019, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2019, *Surat Edaran Nomor HK.02.02.V/0361/2019 Tentang Kewajiban Memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2020, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2020, *Surat Edaran Nomor HL.02.02/IV/2243/2020 Tentang Pemanfaatan Obat Tradisional untuk Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit, dan Perawatan Kesehatan*, Jakarta.
- Peraturan Gubernur Jatim, 2016, *Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu*, Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Jatim, 2016, *Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Jatim, 2020, *Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu*, Jawa Timur.
- Presiden Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan*, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional*, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, Jakarta